

### **BAB III**

#### **PEMERINTAHAN MONARKI NEPAL**

Banyak contoh tentang politisi yang tetap percaya diri, tak mau mengalah walau kinerja dan perbuatannya tidak terpuji. Namun demikian tetap saja ada satu dua politisi di dunia ini yang mau mengalah demi masa depan negaranya. Contoh terbaru untuk itu adalah Raja Gyanendra dari Nepal. Raja mencoba menerapkan sistem dengan kekuatan absolut. Ia menjadi Raja dan juga sebagai kepala pemerintahan sejak Februari 2005. Setelah itu Nepal dilanda huru-hara setiap hari.

#### **1. Wafatnya Raja Nepal Birendra Bir Bikram Shah**

Dapat dibayangkan tentara Gurkha Kamp Shorncliffe pada saat itu melaksanakan upacara dengan ujung senjata dihias sekuntum bunga. Mereka berbaris khidmat di depan potret besar Raja Nepal, Binendra, dan istrinya, Ratu Aishwarya. Itulah penghormatan terakhir bagi pasangan kerajaan yang wafat 1 Juni 2001. Memasang bunga di ujung senjata adalah tradisi kuno Nepal, yang hanya dilakukan untuk menghormati seseorang yang benar-benar dicintai.

Para prajurit ini yang meminta upacara khusus untuk menghormati Raja dan Ratu Nepal, kata juru bicara Kamp Shorncliffe, sebagaimana dikutip

harian *The Times*. Letnan Kolonel Ian Thomas, komandan Batalyon Gurkha, kemudian menetapkan hari tersebut sebagai hari perkabungan. Seluruh pasukan Gurkha pasukan elite legendaris Inggris sejak Perang Dunia II, memang berasal dari salah satu wilayah di Kerajaan Nepal.<sup>20</sup>

Sungguh mengharukan melihat para prajurit, yang biasanya keras itu, meletakkan satu per satu bunga mereka di tanah. Ini mengingatkan saya pada peristiwa serupa ketika masyarakat Inggris dan para pencinta Lady Diana beramai-ramai meletakkan karangan bunga pada saat *Princess of Wales* itu meninggal.

Kesedihan tentara Gurkha yang telah lama hidup jauh dari Nepal dan mengabdikan bagi Kerajaan Inggris tak bisa dibandingkan dengan kesedihan rakyat Nepal. Hingga akhir pekan lalu, pemerintah Nepal telah beberapa kali menetapkan pemberlakuan jam malam karena kesedihan rakyat telah berubah menjadi kemarahan tak terkontrol di jalan-jalan Kathmandu, ibu kota Nepal.

Semua kantor pemerintah, bahkan istana kerajaan, menjadi sasaran kemarahan warga yang kecewa. Ribuan orang turun ke jalan, berusaha menyerbu gedung-gedung itu. Kesedihan dan kemarahan berlarut warga Nepal ini muncul, karena bagi mereka kematian Raja Birendra dan Ratu Aishwarya merupakan teka-teki besar yang menggantung tak terjelaskan.

---

<sup>20</sup> Khanna, D. D. and G. Kueck (2003) *Human Rights and Democracy Nepal* (eds.). Delhi: Shipra Publications

Sang raja dan ratu ditemukan meninggal akibat tembakan di ruang makan kerajaan. Insiden pada saat makan malam ini juga menewaskan enam anggota keluarga kerajaan lain. Pangeran Nirajan, putra bungsu Raja Birendra, dan kakaknya, Putri Shruti, termasuk yang ikut terbantai malam itu.

Tiga anggota keluarga kerajaan, Gorakh Bikram (suami Putri Shruti), Dhirendra Shah (adik bungsu Raja Birendra), dan Komal Shah (adik Ratu Aishwarya sekaligus istri Pangeran Gyanendra, adik Raja Birendra) terluka parah dalam insiden itu. Dua yang pertama akhirnya meninggal. Anehnya, Pemerintah Nepal seolah mengelak memberi keterangan resmi.

Sumber-sumber di Istana Kerajaan Narayanhiti membocorkan sebuah versi mengejutkan. Menurut bocoran ini, pelaku penembakan adalah Putra Mahkota, Pangeran Dipendra, 29 tahun. Konon, Dipendra marah karena rencananya menikahi Devyani Rana, putri mantan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan Nepal, Pashupati Shumshere Rana, tak disetujui sang ibu, Ratu Aishwarya.

Pada saat pertengkaran memuncak, Pangeran Dipendra dilaporkan tampak masuk ke kamarnya, lalu kembali ke ruang makan dengan senapan otomatis Uzi dan M-16 di kedua tangannya. Dipendra pun menembaki anggota keluarganya sebelum akhirnya menembak diri sendiri. Versi ini tak sempat

Maklum, bagi mereka Raja Birendra adalah titisan Wisnu, salah satu dewa dalam ajaran Hindu. Tapi, lepas dari kepercayaan itu, sebagian besar rakyat Nepal memang mencintai Raja Birendra,

Padahal, Raja Birendra yang selalu bersuara lembut ini tak terlalu kharismatis. Pidatonya pada acara-acara resmi kaku dan penuh jargon. Tapi, di luar pidato resmi, Birendra benar-benar pandai merebut hati rakyat. Ia senang bertatap muka dengan penduduk pedesaan. Ia pun tak pernah menolak mendengar keluhan warga kebanyakan.

Raja Birendra kerap melakukan perjalanan dengan helikopter yang diterbangkannya sendiri ke pelosok-pelosok Nepal. Raja yang dinobatkan pada 1975 itu juga berperan penting mengubah Nepal menjadi negara demokrasi multipartai pada 1990. Ketika itu, ia menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada dewan menteri yang dipimpin seorang perdana menteri.

Namun, dalam era multipartai itu, peran Birendra tetap besar. Dalam satu dekade berjalannya demokrasi, Nepal telah berganti perdana menteri 10 kali. Kerapnya pergantian pemerintahan ini membuat Birendra harus bisa memainkan peran sebagai diplomat. Ia harus cerdik mempertahankan netralitas Nepal di tengah tekanan dua tetangga besarnya: India dan Cina.

Belakangan, Birendra juga ikut disibukkan oleh pemberontakan kelompok komunis Nepal pengikut ajaran Mao Zedong. Kelompok ini ingin

menghancurkan monarki Nepal, dan menjadikannya negara Komunis satu partai. Sudah lebih dari 2.000 warga Nepal tewas karena pemberontakan ini.<sup>22</sup>

Raja Birendra Bir Bikram Shah Dev lahir di Nepal pada 1945. Ia putra sulung dari enam anak Raja Mahendra. Kakek Birendra, Raja Tribhuwana, berhasil menjadi raja lewat pengambilalihan kekuasaan sebuah kudeta monarki terhadap Dinasti Rana pada 1951. Sejak itulah, dinasti Shah menggusur monarki dinasti Rana yang telah berkuasa di Nepal sejak abad ke-19. Pada masa pemerintahannya, Tribhuwana sebenarnya telah berupaya mengimplementasikan demokrasi. Tapi, semua upaya itu dimentahkan Raja Mahendra, ayah Birendra, ketika ia mewarisi tahta kerajaan pada 1955. Maka ketika 17 tahun kemudian Birendra naik tahta, ia sebenarnya mewarisi sebuah kekuasaan yang benar-benar mutlak dari ayahnya.

Birendra berbeda dengan ayahnya. Alih-alih jadi diktator, ia malah menjadi pembaru bagi demokrasi. Sejak masih menjadi putra mahkota, Birendra telah menunjukkan "pemberontakan". Pada Februari 1970, misalnya, ia mengejutkan dunia ketika memutuskan menikahi Ratu Aishwarya. Pilihan ini kelak tercatat sebagai tonggak penting dalam sejarah monarki Nepal.

Ratu Aishwarya adalah anggota dinasti Rana, yang digulingkan oleh dinasti Shah pada 1951. Pernikahan Birendra-Aishwarya pun menjadi simbol penyatuan dua dinasti berpengaruh ini. Belakangan, pulihnya hubungan kedua

---

<sup>22</sup> [www.google translate.com/Birendra King change political in Nepal](http://www.google.translate.com/Birendra+King+change+political+in+Nepal), diakses 24 Mei 2009

dinasti makin kokoh setelah dua adik perempuan Aishwarya juga dinikahi oleh dua adik laki-laki Birendra.

Kepercayaan Birendra terhadap demokrasi tampaknya diperoleh dari pengalaman hidupnya di Inggris, tempat monarki dan demokrasi hidup berdampingan. Birendra adalah anggota keluarga Kerajaan Nepal pertama yang memperoleh pendidikan Barat di *Eton College*, yang hingga kini menjadi sekolah wajib bagi para pangeran dan pewaris tahta Kerajaan Inggris.

Hubungan Birendra dengan Inggris memang istimewa. Ia, misalnya, pernah memperoleh gelar *field marshal* kehormatan dari Angkatan Darat Inggris. Kelak, Birendra juga mengirim dua putranya untuk belajar di *Eton*. Meski demikian, hubungan Birendra dengan negeri-negeri lain pun cukup baik. Sebab, Birendra tercatat pernah kuliah di *Universitas Harvard* dan *Universitas Tokyo*.

Raja Birendra sangat suka tampil dalam balutan *uniform militer*. Namun Birendra yang juga pemimpin tertinggi tentara kerajaan Nepal, ternyata justru lebih suka menghindari penggunaan kekerasan. Ia, misalnya, tak mau menumpas pemberontak Maois dengan kekuatan militer.

Menurut Birendra, sungguh tidak etis bagi seorang Nepal untuk memerangi sesama bangsanya. Maka, hingga hari kematiannya, Birendra memakai kepolisian untuk menangani pemberontakan itu. Padahal ia tahu

persis, dipandang dari sudut apa pun, kepolisian Nepal sangat tak terlatih menangani pemberontakan bersenjata.

Bagi Birendra, pemulihan demokrasi pada 1990 membuat monarki Nepal memiliki tugas baru yang tak gampang. "Monarki kini hadir untuk menjamin harmoni," katanya di depan utusan *Inter-Parliamentary Union* di Kathmandu, pada 1995. Dan banyak pihak, termasuk Manmohan Adhikari, pemimpin Partai Komunis Nepal, memuji Raja Birendra untuk peran barunya ini.

Manmohan Adhikari mengalami langsung ampuhnya "tangan dingin" Raja Birendra. Pada Juni 1995, sebagai perdana menteri, Adhikari meminta Birendra membubarkan parlemen dan mengumumkan percepatan pemilihan umum. Adhikari terpaksa berpaling pada Raja, karena dua partai oposisi mencabut dukungannya. Akibatnya, Nepal berada di tepi krisis politik.

Ketika itu, wibawa Raja Birendra terbukti bisa menyelamatkan demokrasi Nepal. Birendra menolak menyerahkan pemerintahan kepada Partai Kongres Nepal, yang mengklaim telah memperoleh suara mayoritas di parlemen. Ia malah menetapkan Adhikari sebagai pejabat sementara untuk menyelenggarakan pemilu baru.

Keputusan itu sempat dinilai sebagai bukti bahwa demokrasi yang diinginkan Birendra sebenarnya tak lebih dari upaya menghimpun kekuatan pro-monarki untuk melanggengkan sistem yang menguntungkan keluarganya.

"Keputusan itu adalah olok-olok bagi parlemen," kata pemimpin Partai Kongres Nepal saat itu, Sher Bahadur Deuba.

Belakangan, keputusan Birendra terbukti benar. Pemilu menyebabkan partai-partai yang bertikai berhasil dirujukkan. Tuduhan bahwa raja memilih-milih partai tertentu juga tak dipercaya rakyat. Sebab, 11 bulan sebelum itu, dalam kisruh politik serupa, keputusan Birendra justru menguntungkan Partai Kongres Nepal.

Pada Juli 1994, parlemen menolak segala kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Girija Prasad Koirala dari Partai Kongres. Mereka meminta Koirala mengundurkan diri, terutama karena tuduhan korupsi US\$ 17,9 juta di perusahaan penerbangan Nepal. Alih-alih mengabulkan tuntutan parlemen, Raja Birendra ketika itu juga memilih menyelenggarakan pemilu baru.

Di mata banyak warga Nepal, keputusan Birendra di bidang politik ini membuktikan upayanya melindungi demokrasi Nepal yang masih berusia muda. "Raja Birendra memilih apa yang terbaik buat bangsa ini," kata penjual sayuran Umesh Singh kepada Asiaweek, beberapa saat setelah Birendra mengumumkan lebih memilih pemilu daripada menjatuhkan pemerintahan Ahikari.

## 2. Tahta Gyanendra

Beberapa hari setelah kematian Birendra, rakyat Nepal punya sasaran kemarahan baru Pangeran Gyanendra. Adik Birendra ini, dilantik secara resmi sebagai raja baru Nepal. Gyanendra ditetapkan oleh Raj Parishad menjadi raja setelah Pangeran Dipendra tak bisa pulih dari koma, dan dinyatakan wafat.

Gyanendra, raja baru ini, menjadi pusat kecurigaan karena sempat sedikit asal-asalan mengumumkan penyebab insiden makan malam berdarah itu. Ia menyebut insiden itu terjadi kerana "kecelakaan yang aneh" akibat "senjata otomatis yang meletus tiba-tiba". Belakangan, Gyanendra meralat pengumuman itu dan menyatakan kerumitan hukumlah yang membuat ia tak bisa mengatakan hal yang sebenarnya.

Gyanendra pun berjanji akan mengumumkan secara terbuka sebab kematian mendiang Raja Birendra dan keluarganya, segera setelah tim penyidik menyelesaikan investigasinya. Tapi, rakyat di jalan-jalan tak mau tahu. "Gyanendra pasti ada di belakang peristiwa kematian Raja Birendra," kata Giri Raj Basnet, salah satu pemrotes itu, kepada *International Herald Tribune*.

Kemarahan di jalan-jalan memang jelas mengarah pada Gyanendra. "Gantung yang bersalah. Kami tak percaya Gayendra," begitu poster dan slogan yang diteriakkan para pengunjung rasa. Gyanendra, 53 tahun, adik Raja Birendra, memang lolos dari maut cuma karena kebetulan sedang tak berada

di istana malam itu. Konon, Gyanendra punya acara mendadak di istana musim dingin Pokhra.<sup>23</sup>

Yang membuat Gyanendra lebih dicurigai adalah keberadaan putranya, Pangeran Paras, 27 tahun, pada acara makan malam itu. Berbeda dengan yang lain, Paras yang kini otomatis menjadi putra mahkota, selamat tanpa luka sedikitpun. Sementara Komal Shah, ibu Paras dan istri Gyanendra, yang sebelumnya dikabarkan luka parah, juga diumumkan berangsur sehat.

Pangeran Paras inilah yang dikabarkan sempat menyusul Pangeran Dipendra ke kamarnya sebelum putra Raja Birendra ini keluar lagi dengan membawa senapan otomatis. Laporan televisi Nepal yang menyebut bahwa otopsi Dipendra menunjukkan ia ditembak dari belakang makin menambah kecurigaan adanya konspirasi besar menghabisi keluarga Birendra.

Penganut teori ini mengungkap fakta bahwa baru beberapa bulan terakhir ini Dipendra didekati dan kelihatan akrab dengan Paras. Karena bergaul akrab dengan Paras itu, Dipendra mulai dikenal sebagai pengunjung tetap beberapa klab malam terkemuka di Kathmandu. Di X-Zone dan Bakery Cafe, misalnya, dua pangeran ini menjadi pemuka dari sekelompok pemuda kaya yang gemar menghisap hashish.

Rakyat Nepal memang membenci Paras. Ia dikenal suka mabuk-mabukan dan beberapa kali terlibat kasus kriminal: seperti penembakan dengan senjata

---

<sup>23</sup> Dahal, D. R. (2004) Conflict Situation in Nepal. Kathamndu: Friedrich Ebert Stiftung.

api. Paras juga dicurigai terlibat pembunuhan seorang penyanyi dalam sebuah insiden lalu lintas. Teori konspirasi ini juga dipercaya kalangan liberal dalam politik Nepal.

Kalangan ini percaya bahwa Raja Birendra sebenarnya dibenci kalangan konservatif. Beberapa tahun terakhir, kritik terhadap demokrasi multipartai yang disokong Birendra memang mulai muncul. Kalangan konservatif menganggap nilai-nilai demokrasi telah mendorong warga Nepal berlaku seenaknya sendiri seenaknya mengganti perdana menteri, menerima sogokan, atau berhubungan seks sebelum menikah.

Kaum konservatif percaya, tingkat kriminalitas di Nepal, yang beberapa tahun terakhir melonjak sangat tinggi, muncul akibat keterbukaan yang terlalu cepat. Kelompok konservatif juga menilai pendekatan Raja Birendra dan pemerintahan demokratis terlalu lunak dalam menghadapi pemberontakan kelompok Maois.

Teori konspirasi lain juga muncul. Teori ini menyebutkan bahwa Cinalah yang ada di belakang pembunuhan ini. Sebab, raja Birendra memang lebih menyukai India daripada Cina, sementara raja baru Gyanendra justru sebaliknya. Apa pun, misteri kematian 10 anggota keluarga monarki Nepal ini tampaknya bakal terus menjadi rahasia. Sebab, kemungkinan Dipendra benar-benar melakukan penembakan juga tak tertutup. Semasa belajar di *Eton College*, Pangeran Dipendra memperoleh nama julukan "Dippy". Dalam

bahasa slang di Inggris, nama julukan ini berarti seseorang yang labil, mudah meledak, dan sedikit gila. Tentu bukan tanpa alasan Pangeran Dipendra memperoleh julukan itu.

Yang jelas, kini Kerajaan Nepal, monarki Hindu satu-satunya di dunia, tengah berada di ujung tanduk. Raja baru Gyanendra telah kehilangan kepercayaan sebagian besar rakyat. Lihat saja, di wilayah Bhaktapur, ribuan penduduk terang-terangan berunjuk rasa meminta monarki dihapuskan saja. Rupanya, tahta suci dinasti Shah, titisan Wisnu, sudah tak lagi dipandang suci.<sup>24</sup>

Setelah keberhasilan gerakan masa April 2006 terhadap Raja Gyanendra mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, dengan kekuatan rakyat tersebut Negara Nepal bisa berubah menjadi Negara Republik Federal Demokratis. Nepal yang telah dibawa di bawah kontrol sipil. Tetapi, Nepal negara sedang dirawat oleh dunia internasional masyarakat sebagai lembut, rapuh dan lemah karena ketidakmampuan terus sah pada kekuatan monopoli, kontrol kompetitif kekerasan, melakukan "fungsi negara inti" dan berhasil menangani penting pasca konflik masalah, kebutuhan dan menghadapi masalah dengan masyarakat Nepal.

Nepal lemah karena kekurangan sumber daya keuangan untuk melakukan swasembada negara-bangunan proses dibiayai sendiri oleh penerimaan pajak

---

<sup>24</sup> Krisnadi Yulianawan, Ragam Gatra Nomor 30, 11 Juni 200, diakses 4 April 2009 dari URL: [http://www.gatra.com/2001-06-15/versi\\_cetak.php?id=7137](http://www.gatra.com/2001-06-15/versi_cetak.php?id=7137)

dan kembali konflik melemahkan struktur dan kebijakan. Ini adalah kelembagaan yang paling sesuai dengan keberadaannya sangat besar dalam masyarakat pedesaan. Akibatnya, tugas-tugas dari stabilisasi nasional persatuan dan tertib partisipasi warga dalam konstitusi-making, bangunan negara dan proses perdamaian di jalan tetap memuaskan yg menggiurkan.

Perkotaan di Nepal masyarakat sipil dan LSM tersebut akan disusun dalam gaya dan berupa ruas bertentangan dengan hukum kekuasaan dan kedaulatan negara. Sebagian besar dari partai politik adalah kelompok yang menguasai, menyelenggarakan melalui stabilisasi klien jaringan dan kurang tertarik pada transformasi masyarakat menjadi warga negara. Masalah yang paling sulit yang tetap dan politik konstitusional ketidakstabilan disebabkan oleh pindah dari konstitusional aktor dari konsensus untuk persaingan politik, bebas naik kecenderungan beberapa pelaku yang menikmati lebih banyak kuasa daripada mereka sebenarnya mewakili kondisi sosial, penyaluran perjuangan gerakan sosial bagi pelaku, sumber daya, identitas dan ekstra-konstitusional kegiatan bersenjata non-negara sehingga negara memanjakan perdamaian dan keamanan.

*Konstituante (CA)* pemilihan telah memperluas sosial, jenis kelamin dan antar generasi basis kekuasaan politik. Namun, ada kurangnya pendidikan, ekonomi, teknologi, kelembagaan dan kepemimpinan dari modernitas prasyarat untuk mempertahankan ini membusung politik kelas struktural dan

reformasi pajak sebagai kontribusinya hanya 12 persen untuk PDB. Di masa mendatang, yang terus kesenjangan antara tradisional dari patronase politik dan sosial ekonomi berbasis revolusi memberikan harapan oleh meningkatnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan akan terus membuat pemerintah dan sistem politik goyah. Ketidakmampuan kelas-kelas yang memerintah politik untuk menanggulangi berbagai tantangan dalam masa pemerintahan.

Penuturan warga terhadap kondisi yang anamali telah membuat ruang dan partisipasi warga nepal yang menggolongkan kekuasaan mutlak dari kelompok kecil berdasarkan identitas jenis kelamin, kelas, kasta, etnis, wilayah dan agama, daripada melihat secara identitas warga yang telah membuat konflik terbuka untuk diakhiri. Dari beberapa identifikasi yang dilakukan masyarakat telah melemahkan loyalitas mereka kepada negara, ketidakpercayaan apapun untuk menghormati supremasi hukum dan membuka masalah baru keamanan. Jalan buntu yang dibuat oleh konsepsi yang berlawanan dari penyesuaian angkatan bersenjata, miskinnya kepercayaan antara sipil dan militer dan konflik visi demokratis republik versus orang republik telah menyediakan berbagai kelompok bersenjata untuk mengurangi kekuasaan dan berkurangnya pembangunan ruang.

Adopsi dari luar konstitusional modus resolusi konflik dan perubahan politik setiap kali telah menetapkan kebutuhan dari nafsu politik budaya

kaum muda di setiap sayap menyinggung pihak dan pemahaman politik sehingga menarik Menteri Bam Dev Gautam ia mengakui ketidakmampuan untuk memperbaiki situasi keamanan di negara ini. Partai politik dan sipil masyarakat hanya dapat melepas potensi integrasi nasional jika negara dan sistem politik stabil, kepemimpinan mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk resolusi konflik dan aturan permainan diterima oleh semua aktor-sebenarnya, potensi dan tersentuh. Untuk itu, ia harus melanjutkan dengan kerangka kelembagaan yang mampu menangkal bahaya teritorial, politik dan beraagam konflik agama atas banyaknya masalah (Wimmer dan Schetter, 2002:3) dan memungkinkan sebuah kerangka kerja untuk dapat saling demokratis damai.

Selama setahun lebih Nepal menjadi negara yang terus dilanda kerusuhan dengan jumlah korban tewas meningkat karena polisi dan tentara mencoba meredakan huru hara dengan memukul, menembak demonstran hingga mati. Hal itu semakin menambah daftar yang tewas sejak kelompok pemberontak Maois bergerilya sejak 1996, yang sudah menewaskan 13.000 orang.

Kedaaan makin memburuk karena oposisi Nepal juga bergabung dengan Maois untuk menyatukan kekuatan. Puncak kerusuhan adalah April 2006. Setelah itu Raja "mengalah" dengan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada sipil di bawah pimpinan Perdana Menteri Girija Prasad Koirala.

Tentara Nepal belum menyatakan penolakan terhadap Raja, namun upaya rekonsiliasi sudah dicoba dilakukan. Tidak jelas mengapa Raja mau mengalah. Yang jelas, istana kerajaan di Nepal selalu dijaga tentara di berbagai sudut dalam 24 jam sehari.

Raja memang terkesan menghindari pertemuan langsung dengan rakyat. Pada sebuah festival rutin tahun ini, di mana Raja Nepal seharusnya hadir, hal itu tidak terlaksana tanpa disebutkan alasannya.

Namun demikian Gyanendra, yang dikaitkan dengan pembunuhan saudara kandungnya dan kemudian menjadi Raja Nepal, telah dicatat dalam sejarah Nepal. Ia mendorong rekonsiliasi. Raja menyerahkan kekuasaan pada sipil, yang sekaligus mengakhiri sistem feodalisme yang sudah berlangsung selama 238 tahun.

Ia juga mengizinkan PM Nepal mengundang Maois, yang dipimpin Prachanda, untuk bergabung ke pemerintahan. Tadinya Maois adalah gerilyawan yang menginginkan perubahan sistem monarki di Nepal.

Nepal pun berpesta. Prachanda menjanjikan sebuah Nepal yang baru. Nasib Nepal ke depan masih ditentukan oleh sikap-sikap dan kebijakan politisinya. Namun Nepal telah memasuki babak baru, era rekonsiliasi. Itu tak lepas dari sikap Raja Gyanendra yang mau mengalah demi kepentingan negara berpenduduk sekitar 20 juta lebih itu.

Parlemen Nepal dalam satu pemilihan yang diambil dengan suara bulat telah melucuti Raja Gyanendra dari haknya untuk memveto undang-undang sebagai tindakan yang secara resmi membuatnya seorang raja seremonial, kata satu maklumat resmi.

Undang-undang itu, yang disahkan oleh pemerintah sementara yang mulai berkuasa ketika Raja Gyanendra tunduk pada protes rakyat dan menyerahkan kekuasaan absolut, disahkan Sabtu malam, menurut maklumat parlemen yang dipublikasikan Minggu tersebut.

Sekarang peran raja adalah sepenuhnya seremonial, Raghuji Panta, seorang anggota parlemen dari Partai Komunis Nepal. Parlemen membuat pernyataan yang secara drastis memangkas kekuasaan raja dan perundangan secara resmi membatalkan haknya untuk menolak rancangan dan undang-undang yang disahkan oleh parlemen, menurut seorang anggota senior parlemen.

Dengan disetujuinya undang-undang itu, satu peraturan baru telah dibuat bahwa kekuasaan eksekutif penuh negara dipusatkan pada dewan menteri dan parlemen memegang kekuasaan legislatif, kata Subash Nenwang, ketua di majelis perwakilan rendah.

Di samping kehilangan kekuasaan hak veto terhadap legislatif, raja tidak lagi menguasai Tentara Nepal yang memiliki 90.000 personil maupun dapat memilih seorang putera mahkota. Raja didesak turun dari kekuasaan setelah

protes yang dilakukan oleh partai-partai politik bersama dengan pemberontak Maois yang menentang perebutan kekuasaannya pada 1 Februari 2005.

Partai-partai dan pemberontak sejak itu mempelajari satu gencatan senjata dan pemerintah memenuhi satu tuntutan penting pemberontak, untuk mengadakan pemilihan guna memilih majelis yang akan merancang kembali konstitusi Nepal.

Namun pemberontak menginginkan pemerintah bergerak lebih cepat dan membentuk pemerintah baru sementara yang mencakup mereka. Pada waktu ketika kita menekankan pembubaran parlemen sekarang ini, semua perundangan dan pengumumannya tak berarti, kata jurubicara Maois Krishna Bahadur Mahara.<sup>25</sup>

Meskipun beberapa poin perundangannya positif, hal itu menunjukkan bahwa partai-partai melalui keputusan mereka yang terburu-buru melantur jauh dari agenda besar menciptakan perdamaian di negara ini. Seorang pengamat politik mengatakan, perundangan itu sekarang dibutuhkan untuk diikuti satu konstitusi baru. Konstitusi 1990 telah mengakhiri monarki absolut dan mengantar demokrasi parlementer, tapi memberi raja kekuasaan untuk memveto undang-undang. Raja juga memperoleh kembali komando tertinggi tentara. Para anggota parlemen harus mengerti bahwa undang-undang itu bukan pengganti bagi konstitusi. Konstitusi sementara dibutuhkan untuk

---

<sup>25</sup> Acharya, Meena. 2003. "Efforts at Promotion in Nepal," *nepaldemocracy.org* 2003

menyelesaikan krisis politik, kata seorang guru besar politik dari universitas Tribhuvan Nepal.

Raja Gyanendra telah membubarkan pemerintah dan mengambil kekuasaan langsung karena, katanya, partai-partai politik korup dan tidak berhasil menangani perlawanan pemberontak. Tindakan itu pada awalnya menarik beberapa dukungan rakyat saat negara itu, satu dari 10 negara termiskin di dunia, menghadapi serangan terus-menerus dan blokade transportasi yang menaikkan harga dan mengecilkan hati pariwisata, arus utama ekonomi.

Namun raja menggunakan kekuasaannya untuk menindas pihak yang tidak sepakat dengannya termasuk menangkap pemimpin politik dan mengekang media yang memicu aliansi antara pemberontak dan aliansi tujuh partai besar. Sejak pemberontak memulai "perang rakyat" mereka pada 1996, sedikitnya 12.500 orang telah tewas.

## **A. Masa Pemerintahan Monarki Konstitusional**

### **1. 1990-1996: Monarki Parleментар**

Pemilu Nepal kali ini memang berpotensi mengubah wajah pemerintahan negeri itu. Jika kelompok pemberontak Maois dinyatakan sebagai pemenang pemilu, maka nasib pemerintahan monarki yang dipimpin Raja Gyanendra berada di ujung tanduk. Artinya, pemerintahan monarki di negeri itu segera berakhir.

Parlemen baru Nepal akan menyusun UUD baru yang akan memastikan berakhirnya monarki yang telah bertahan selama berabad-abad itu. Inilah yang sebenarnya menjadi impian hampir semua rakyat Nepal selama bertahun-tahun sebuah impian untuk terbebas dari tekanan kebijakan pemerintahan monarki yang absolut.

Pemimpin kelompok Maois Nepal, Prachanda, bahkan akan menggelar pertemuan pribadi dengan Raja Gyanendra. Prachanda akan meminta Raja Gyanendra untuk turun takhta. Prachanda menegaskan bahwa rakyat telah menentukan pilihan mereka dan Raja Gyanendra lebih baik mempertahankan kehormatannya dengan turun tahta.

Di masa lalu, para raja mengungsi atau bahkan dipenggal kepalanya, kata pemimpin Maois itu. Ia berharap sejarah itu tak akan terulang lagi. Tapi bagaimana jika Raja Gyanendra menolak lengser? Ini juga yang akan

mengubah Nepal. Faktanya, Raja Gyanendra dengan penuh kemarahan membantah spekulasi bahwa ia akan meninggalkan negerinya menuju pengasingan, menyusul kemenangan pemberontak Maois. Raja tidak akan pergi ke mana-mana. Ia tidak akan meninggalkan negeri ini, begitu bunyi pernyataan Istana Kerajaan Nepal.

Tapi jika melihat perkiraan hasil pemilu yang akan memenangkan Maois dengan sedikitnya 240 kursi di majelis konstitusi yang beranggotakan 601 orang, sepertinya peluang Raja Gyanendra untuk bertahan menjadi mustahil. Betapa tidak, Dengan peraihan itu, Maois akan menjadi partai dominan di parlemen dengan suara mayoritas.

Kelompok ultrakiri itu bahkan sudah berniat sesegera mungkin menghapuskan sistem monarki yang sudah bertahan selama 240 tahun. Mereka juga meminta Gyanendra meninggalkan istana dengan elegan, ketimbang harus menghadapi paksaan. Maois juga telah memperingatkan raja bahwa ia akan menghadapi peradilan dan hukuman berat, jika ia menolak berubah status menjadi rakyat biasa.

Jika Gyanendra menolak tuntutan itu dan ngotot bertahan sebagai raja Nepal, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Bisa saja Maois akan membiarkan raja berkuasa, tapi kekuasaan itu tak lebih hanya sebagai simbol, tanpa memiliki pengaruh maupun kekuatan untuk memerintah Nepal.

Kemungkinan yang lain adalah Maois akan melawan dan memaksa raja turun takhta dengan cara kekerasan. Jika cara ini yang diambil, kekisruhan Nepal selama puluhan tahun akan terus terjadi, dan makin banyak korban jiwa yang menjadi tumbalnya.

Bila ini terjadi, maka kejadiannya akan lebih parah dibandingkan pada 2006 lalu, ketika partai-partai politik utama di Nepal menggalang ribuan massa untuk menggelar demonstrasi menuntut mundurnya Raja Gyanendra.

Tapi peta perlawanannya akan berubah, karena rakyat kini akan mendapat dukungan lebih besar dari parlemen dan militer setelah kelompok oposisi memenangi pemilu. Sementara Raja Gyanendra kemungkinan hanya akan mendapatkan dukungan dari beberapa divisi militer yang masih setia dan kelompok fundamentalis Hindu yang menganggap Gyanendra sebagai renkarnasi dewa Hindu.

Tapi yang jelas, jika Gyanendra menolak mundur, Nepal yang menjadi salah satu negara termiskin di dunia, hanya akan menyongsong kehancuran. Hingga 1990, Nepal adalah sebuah monarki mutlak berjalan di bawah kontrol eksekutif dari raja. Sehingga raja menghadapi gerakan rakyat terhadap monarki absolut tersebut, Raja Birendra, pada tahun 1990, sepakat untuk reformasi politik dengan menciptakan parlemen monarki dengan raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

## 2. Struktur Pemerintahann Monarkhi Konstitusional

Pemerintah di Nepal telah cenderung sangat tidak stabil, tidak ada pemerintah yang telah bertahan selama lebih dari dua tahun sejak 1991, baik melalui *internal collapse* atau pembubaran parlemen oleh raja. Dalam pertama bebas dan adil Pemilu di Nepal pada tahun 1991, di Kongres Nepal telah berjaya.

Struktur Pemerintahan dalam masa Monarkhi Konstitusional adalah Eksekutif terdiri Raja dan Dewan Menteri (yang Kabinet). Pemimpin partai atau koalisi dengan pengamanan maksimum kursi dalam pemilihan yang diangkat sebagai Perdana Menteri. Kabinet yang diangkat oleh raja atas rekomendasi dari Perdana Menteri.

Pada pemilu 1994 Partai Kongres Nepal kalah dari oleh Partai Komunis di Nepal (*Unified Marxist-Leninist*) (CPN (UML)) Pemilu pertama dalam masa monarkhi konstitusional dimenangkan oleh kelompok komunis di Asia, dengan Man Mohan Adhikary ditunjuk sebahai perdana menteri. Pada pertengahan 1994, parlemen dibubarkan akibat perselisihan di dalam Partai Kongres Nepal. Pemilihan umum yang berlaku, yang diselenggarakan 15 November 1994, telah ada pihak mayoritas dan menyebabkan beberapa tahun yang tidak stabil pemerintah karena berupa pemerintahan koalisi. Sampai

dengan Mei 1999 setelah pemilihan umum, Partai Kongres Nepal sekali lagi memenangkannya dan pimpin mayoritas di pemerintah.<sup>26</sup>

DPR terdiri dari 205 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat. Dewan Nasional memiliki 60 anggota, 10 dicalonkan oleh raja, 35 dipilih oleh DPR dan sisanya 15 dipilih oleh suatu pemilihan oleh perguruan tinggi yang terdiri dari kursi dari desa dan kota. Legislatif yang telah berumur lima tahun, namun dibubarkan oleh raja sebelum pemerintahan ini berakhir.

Ada tiga Perdana Menteri dari Partai Konggers Nepal Perdana Menteri sejak Pemilu 1999 adalah : KP Bhattarai (31 Mei 1999-17 Maret 2000), Girija Prasad Koirala (20 Maret 2000- 19 Juli 2001), dan Sher Bahadur Deuba (23 Juli 2001-2003). Distribusi kursi di Parlemen memberi Kongres Nepal 113 kursi; CPN (UML) 69kursi ; RJM 5 kursi; NSP 5 kursi; dengan Partai Pekerja dan Petani 1 kursi; dan United Front Rakyat 1 kursi. Partai Kongres Nepal pecah menjadi Partai Kongres Nepal yang dipimpin oleh GP Koirala dan Kongres Nepal (Demokrat) yang dipimpin oleh Sher Bahadur Deuba. Di antara yang dipilih MPS, MPS memiliki 39 anggota Kongres Nepal (Demokrat). Mantan Perdana Menteri dan berpengaruh Pemimpin Krishna Prasad Bhattarai telah menyatakan dukungan untuk Kongres Nepal (Demokrat). Kedua pihak menganggap Kongres Krishna Prasad Bhattarai sebagai pemimpin utama mereka. Raja Gyanendra habis Sher Bahadur Deuba

---

<sup>26</sup> Upreti, B. R. (2004) *The Price of Neglect: From Resource to Maoist in the Himalayan Kingdom*. Kathmandu: Bhrikuti Academic Publications. Pages 446.

dan pada 4 Juni 2003 diangkat Surya Bahadur Thapa sebagai Perdana Menteri.

Sebagaimana diketahui, Nepal saat ini merupakan salah satu negeri yang dilanda kecamuk krisis politik yang sangat akut. Krisis ini membawa Nepal pada situasi yang sangat tidak menentu. Selama sepuluh tahun terakhir, dikabarkan 13.000 rakyat telah menjadi korban akibat tingginya intensitas kekerasan di Negeri itu.<sup>27</sup>

Tingginya jumlah korban, tak pelak, melahirkan keprihatinan dan simpati yang dari berbagai kalangan internasional, seperti PBB dan Amnesty Internasional. Salah satunya adalah lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia, *Human Right Watch* (HRW) yang menyatakan bahwa Pemberontak Maois dan Raja Nepal Gyarendra adalah pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atas tingginya intensitas kekerasan yang dialami rakyat Nepal hari ini.

Desakan-desakan dunia internasional untuk mengakhiri kekerasan pun bermunculan. Tidak kurang, Amerika Serikat sendiri meminta agar Raja Gyarendra mau memulihkan kembali kehidupan demokrasi pasca pembubaran parlemen dan dikembalikannya sistem pemerintahan monarki absolut awal tahun lalu. Pihak-pihak internasional meminta agar semua pihak yang

---

<sup>27</sup> Karki, A, and D. Seddon (2003)(eds.), *The People's in Nepal: Left Perspectives*. Delhi: Adroit Publishers.

bersitegang untuk mau menempuh perundingan guna menemukan solusi pemecahan dengan cara damai.

Raja Gyarendra yang tengah terpojok dengan setengah hati menyatakan bersedia mengikuti saran-saran dari dunia internasional dengan menggelar pemilihan umum. Namun sial baginya, pemilu yang dicanangkan olehnya ternyata tidak disambut baik oleh Rakyatnya. Terbukti, partai-partai oposisi menyatakan tidak bersedia mengikuti pemilu yang dicanangkan Gyarendra. Alhasil, hanya sebagian kecil rakyat yang datang ke tempat-tempat pemilihan. Dan, krisis pun meningkat lebih tinggi.

Di sisi lain, pihak Pemberontak Maois sempat secara sepihak mencanangkan gencatan senjata. Keputusan ini diambil pasca peristiwa pemboman terhadap sebuah bus angkutan umum yang menewaskan 40 orang penumpangnya. Pihak Maois mengakui peristiwa itu sebagai kesalahan dari pihaknya. Oleh karenanya, pihak Maois menyatakan meminta maaf dan mengumumkan hukuman pada para kadernya yang terlibat dalam peristiwa itu. Keputusan gencatan senjata sepihak yang diumumkan Pemberontak Maois seolah membuka ruang bagi tentara kerajaan (*Royal Army*) Nepal dengan menggunakan persenjataan berat melalui angkatan udaranya untuk mengintensifkan penyerangan pada kubu-kubu pertahanan tentara Pembebasan Rakyat Nepal. Desa-desa yang diduga menjadi basis tentara Pembebasan Rakyat tak luput dari serangan. Rangkaian pemboman atas desa-

desa itulah yang menyebabkan kubu Maois mengakhiri keputusan gencatan senjata.

Meski tidak menampik kenyataan tentang buruknya dampak yang diakibatkan oleh peperangan, namun Ketua Prachanda menampik tuduhan yang menyatakan pihaknya sebagai satu-satunya yang harus dimintai pertanggungjawaban. "Sudah pasti, kami semua prihatin dengan kenyataan itu. Namun pertanggungjawabannya tidak terletak pada pundak kami. Kecil dari klas yang berkuasa yang hendak mempertahankan Nepal sebagai negeri dengan sistem feodal pertengahanlah yang harus dimintai pertanggungjawaban," jelasnya pada wartawan BBC.

Pada bagian itu, Prachanda juga menyatakan, "siapapun tahu bahwa ketika kami berada di dalam parlemen dan mengikuti seluruh prosedurnya, kami mengajukan 40 tuntutan untuk memecahkan masalah pokok Rakyat Nepal dengan cara damai. Namun, ketika klas feodal yang berkuasa tidak siap memecahkan persoalan Rakyat dengan cara damai, namun justru secara brutal dan inkonstitusional menyalahkan partai kami dan Rakyat Nepal yang mendukung kami, mereka telah memaksa kami dan Rakyat Nepal untuk melawan dengan cara mengangkat senjata".

Kini, intensitas kekerasan dipastikan akan meningkat. Menyusul adanya kesepakatan dari partai-partai politik yang berposisi kepada Raja Nepal untuk menggelar pemogokan umum guna memboikot dan menjatuhkan kekuasaan Raja Gyarendra. Rupanya, Raja Gyarendra telah semakin putus

asa. Perhatiannya dan kekuatannya terpecah. Di satu sisi harus menghadapi meningkatnya intensitas gerilya rakyat, di sisi lain harus mengalokasikan kekuatannya yang semakin mengecil untuk meredam gerakan di perkotaan.

Persis seperti diprediksi oleh Marx dalam "*A Preface to a Contribution to Political Economy*", tindakan politik dari klas reaksioner justru semakin memungkinkan terpenuhinya syarat-syarat dari kekuatan baru yang bangkit melalui gerakan revolusioner. Hal ini terbukti manakala Raja Gyarendra semakin tidak bisa memungkiri kebrutalannya ketika secara tidak demokratis memberlakukan jam malam yang dianggapnya bisa menangkal pemogokan.

Keputusan itulah yang menyebabkan Raja Gyarendra semakin terkucil di negerinya sendiri. Aliansi antara partai-partai perlementer dengan Partai Komunis Nepal (Maois) yang bergerak ekstra parlementer menjadi semakin kokoh karena menemukan landasan yang semakin kuat. Rakyat dan partai-partai oposisi pun semakin tidak gentar melawan gertakan Raja yang kharismanya tengah semakin memudar.

Yang menarik untuk dipelajari adalah isu mengenai pemilihan umum multi-partai sebagai salah satu pasal yang disepakati antara Partai Komunis Nepal (Maois) dengan Partai-partai elektoral lain yang turut berposisi dengan Raja Gyarendra. Pasal ini terdengar janggal, mengingat dalam khazanah politik di negeri-negeri sosialis sebelumnya, pasal tentang pemilihan umum multi-partai hampir tidak dikenal.

Menurut Prachanda, pihaknya telah mempelajari kelemahan-kelemahan dalam sistem negara sosialis yang diterapkan pada abad ke-20 yang lalu. Belajar-dari kelemahan-kelemahan itu, Partai Komunis Nepal (Maois) telah merumuskan suatu proposal baru mengenai bangunan demokrasi rakyat yang hendak ditata di Nepal. Secara esensi, bangunan demokrasi tersebut masih mengacu pada pandangan-pandangan mengenai Demokrasi Rakyat yang dikemukakan Mao Zedong. Namun implementasi dari gagasan Demokrasi Rakyat di Nepal akan disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Prachanda menyatakan pada abad ke-21 ini kita tidak bisa begitu saja menerapkan konsepsi negara (sosialis) sebagaimana diterapkan pada abad ke-20, baik yang diterapkan di Uni Soviet pada masa Stalin maupun di Tiongkok pada masa Mao Zedong. Demokrasi rakyat harus dibangun dengan berpegang secara prinsipil kedaulatan rakyat yakni dan memberikan jaminan semaksimal mungkin untuk tegaknya hak-hak rakyat. Semangat inti dari gagasan ini adalah dibutuhkannya kompetisi secara damai (melalui pemilu) yang diikuti oleh seluruh partai untuk melawan feodalisme dan kekuatan imperialis asing. "Itu semua mensyaratkan adanya kompetisi multi-partai atau pemilihan umum," jelas Prachanda. Dengan begitu, Rakyat Nepal-lah yang akan menentukan masa depan Nepal.

Pada kesempatan lain, Prachanda menyatakan pihaknya bersedia melucuti senjata untuk masuk melaksanakan Pemilihan Umum multipartai yang damai dengan pengawasan badan internasional yang netral. Namun hal itu hanya

akan bisa dilaksanakan apabila seluruh partai yang mengikuti pemilu menerima platform anti-imperialis dan anti-feodal. Sebab, menurutnya tidak mungkin kekerasan di Nepal itu dihentikan apabila dominasi imperialisme dan feodalisme masih bercokol di tampuk kekuasaan.

Kini, Rakyat dan Proletariat di Nepal tengah berjuang keras untuk mempertinggi kualitas perang rakyat guna membumihanguskan kekuasaan mutlak yang telah bercokol dan menindas Rakyat selama 237 tahun. Penghancuran feodalisme adalah satu-satunya cara untuk meruntuhkan dominasi imperialisme. Sebagaimana dilontarkan Marx, *war begin before peace*, melalui perang inilah Rakyat Nepal hendak merebut masa depannya untuk demokrasi baru, sosialisme, perdamaian, dan kemanusiaan.

Gerakan lain yang dibangun NEFIN adalah advokasi kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Salah satu-nya ketika Menteri Pertanian dan Kehutanan akan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat, dimana kebijakan tersebut berdampak buruk terhadap kontrol, akses dan pembagian manfaat dari sumber daya alam di wilayah adat mereka. Untuk mengadvokasi persoalan ini, pada 5 Juni 2005, NEFIN memimpin sebuah delegasi masyarakat adat untuk berdialog dengan sang menteri. Pada dialog tersebut NEFIN mengajukan sebuah *memorandum* bahwa pemerintah sebaiknya tidak mengeluarkan kebijakan yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat adat tanpa konsultasi dan melibatkan partisipasi aktif mereka.

negara bagian dimana masyarakat adat akan menguasai region otonom dengan mengontrol hampir semua persoalan kecuali pertahanan dan kerjasama luar negeri.